

# LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

## PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



# LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

## PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





**Pengarah:**

Rudi S. Prawiradinata

**Penanggung Jawab:**

Agustin Arry Yanna

**Tim Akademisi:**

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat

**Tim Pelaksana:**

Novi Mulia Ayu

Yudhie Hatmadji Sudjarwo

Andi Setyo Pambudi

Ika Widyawati

Grace Second Lady Manalu

Yulia Agnis Sutarno

Rahmat Hidayat

Andreas Rudika Ardiyanto

Amelia Ari Putri

**Staf Pendukung:**

Yuda Andika Darmawan

Aisah

Dewi Nurlina

Fahmi Rohman Bimantoro

Asri Abidatilah

M. Yusuf Zaky Amanullah

Aulia Rachma Pramudya

**Informasi selanjutnya, hubungi:**

Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD),

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas

e-mail: [dit.peppd@bappenas.go.id](mailto:dit.peppd@bappenas.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penting dalam perencanaan adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Peran evaluasi diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.

Untuk memberikan informasi pembangunan daerah, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Salah satu cakupan EPD adalah melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi. Laporan ini merupakan *series* laporan EKPD 34 Provinsi yang berfokus pada evaluasi *on going* pencapaian kinerja utama daerah tahun 2022 yang berdasarkan pada kerangka RKP 2022. Laporan EKPD tahun 2022 mencakup informasi pencapaian sasaran pengembangan wilayah, identifikasi faktor pendukung, dan pembelajaran di daerah terpilih. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 hingga saat ini berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan.

Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan laporan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pengguna hasil evaluasi, sangat kami harapkan agar tujuan evaluasi dapat tercapai.

Jakarta, Desember 2022  
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan Daerah,



**Agustin Arry Yanna**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
GLOSARIUM .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Hasil yang Diharapkan .....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Batasan Evaluasi .....	3
BAB II METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN .....	9
2.1. Metode Pengumpulan Data .....	9
2.2. Metode Analisis.....	10
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	16
BAB III HASIL EVALUASI .....	21
3. 1. Gambaran Capaian Makro Daerah.....	21
3. 2. Skoring Capaian Kinerja.....	33
3. 3. Analisis Faktor Pendukung .....	34
3. 4. Hasil Skoring Faktor Pendukung.....	39
3. 5. Analisis Deskriptif Dukungan Daerah.....	39
3. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	44
4. 1 Kesimpulan.....	44
4. 2 Rekomendasi.....	45
BAB V STUDI KASUS DAERAH .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2022 .....	2
Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir EKPD 2022.....	2
Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Cakupan EKPD .....	11
Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah .....	16
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2021 (Persen) ..	21
Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Persen, <i>c-to-c</i> ) .....	22
Gambar 3. 3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan IV-2022 .....	24
Gambar 3. 4 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV-2022 .....	25
Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2017 – 2022 .....	26
Gambar 3.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 – 2022 .....	27
Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 .....	28
Gambar 3.8 Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 – 2022 .....	29
Gambar 3.9 Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022 (Persen)	30
Gambar 3.10 Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022 .....	30
Gambar 3.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Persen).....	31
Gambar 3.12 Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022 .....	31
Gambar 3.13 Pencapaian IPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis .....	9
Tabel 2.2 Kriteria Skoring Capaian Kinerja .....	13
Tabel 2.3 Indikator Faktor Pendukung EKPD 2022 .....	13
Tabel 2. 4 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung .....	15
Tabel 3.1 Komponen Pendukung IPM .....	32
Tabel 3.2 Capaian Kinerja terhadap Target RKP 2022 .....	33
Tabel 3.3 Skor Komponen Sumber Daya Daerah .....	35
Tabel 3.4 Skor Komponen Partisipasi <i>Stakeholders</i> .....	36
Tabel 3.5 Skor Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah .....	38
Tabel 3.6 Agregasi Skoring Indikator Faktor Pendukung Provinsi Kalimantan Selatan .....	39

## GLOSARIUM

<i>Adequate Disclosures</i>	: Kecukupan Pengungkapan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	: Jenis virus dari Coronavirus disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan teridentifikasi pada tahun 2019
Daring	: Dalam jaringan; Terhubung dengan jejaring komputer, internet, dan sebagainya
DAU	: Dana Alokasi Umum
EKPD	: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
<i>Herd Immunity</i>	: Sejumlah besar populasi di sebuah area, kebal terhadap penyakit tertentu
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IDD	: Indeks Demokrasi Daerah
IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan lahan
IKRT	: Industri Kecil dan Rumah Tangga
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KFD	: Kapasitas Fiskal Daerah
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kuratif	: Mempunyai daya untuk mengobati atau menjadi solusi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNPRT	: Lembaga <i>NonProfit</i> yang Melayani Rumah Tangga
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Luring	: Luar Jaringan; Terputus dari jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Menteri PPN	: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
<i>Mixed Method</i>	: Campuran metode; Terdiri dari beberapa metode
MP	: <i>Major Project</i>
MRO	: <i>Maintenance, Repair, and Overhaul</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Daerah
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PN	: Prioritas Nasional
PP	: Peraturan Pemerintah
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RI	: Republik Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SCM	: <i>Success Case Method</i>

SD	: Sekolah Dasar
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
THIS	: Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
TK	: Tingkat Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang

**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**



# BAB I

# Pendahuluan



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi menjadi salah satu dari empat tahapan utama dalam proses pembangunan nasional. Adapun keempat tahapan tersebut meliputi (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sebagai pembelajaran (*lesson learned*) bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Peran strategis evaluasi dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi kebijakan pada tahun berjalan dalam rangka untuk menentukan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

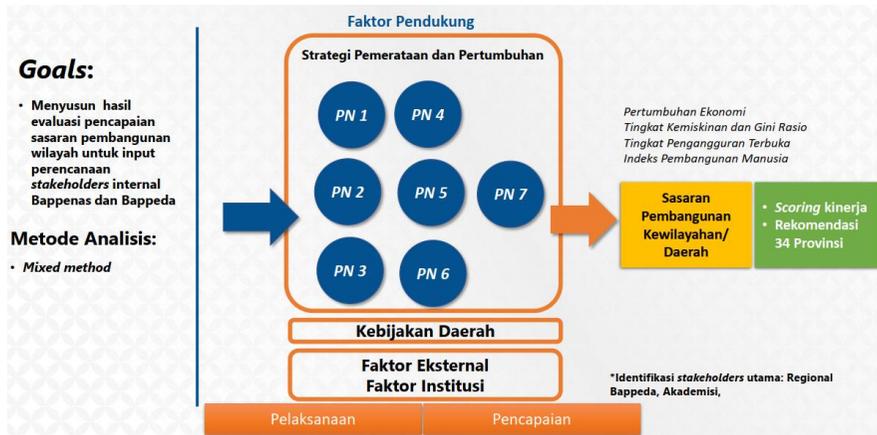
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan semestinya tidak hanya mencakup atas kebijakan dalam perencanaan pusat, namun juga kebijakan dalam perencanaan daerah yang mendukung pembangunan nasional. Adanya pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam dokumen RKP 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 serta Pemutakhiran RKP 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021, terdapat strategi pengembangan wilayah dan Prioritas Nasional 2 yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Substansi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan daerah, dimana dalam implementasinya membutuhkan sinkronisasi intervensi pembangunan baik pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran pembangunan kewilayahan dan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP tersebut.

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2022



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir EKPD 2022



Pelaksanaan kegiatan EKPD di 34 Provinsi ini menekankan pada: (1) evaluasi on-going pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di 34 provinsi; (2) identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran; (3) pembelajaran daerah; dan (4) identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Pada tahun 2022, kami sedang mengembangkan skoring kinerja daerah. Skoring ini akan fokus pada aspek pencapaian daerah berdasarkan capaian indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, sebagai pisau analisis skoring, faktor penjelas yang dikembangkan yaitu faktor modalitas daerah dan faktor pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi *evidence based* sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap program/kegiatan yang sedang berjalan. Selain itu, hasil evaluasi diharapkan dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan yang akan digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut perencanaan (rekomendasi perbaikan kebijakan dan permasalahan pembangunan).

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan EKPD 34 Provinsi tahun 2021 yaitu untuk:

1. Evaluasi *on-going* pencapaian pencapaian sasaran RKP kewilayahan tahun 2022 di 34 provinsi;
2. Identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran;
3. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah; dan
4. Pembelajaran daerah

## 1.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan (*output*) dari pelaksanaan EKPD 34 Provinsi adalah tersusunnya laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diperkuat dengan analisis mendalam dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

## 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup EKPD dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi



Ruang lingkup substansi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 34 provinsi menekankan pada evaluasi *on-going* ketercapaian sasaran PN Kewilayahan, pelaksanaan dukungan daerah di 34 provinsi dan identifikasi isu strategis daerah. Evaluasi pencapaian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam terhadap penyebab fakta *gap* yang terjadi serta identifikasi faktor yang memengaruhi hasil pencapaian tersebut secara kualitatif. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses penyusunan perencanaan tahun selanjutnya.

## 1.4. Batasan Evaluasi

Pelaksanaan EKPD 34 provinsi tahun 2022 memiliki batasan dalam evaluasi yaitu:

- 1) **Pendekatan evaluasi.** Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tidak lagi dilakukan melalui pendekatan *ex-post*, namun melalui pendekatan evaluasi *on-going*. Identifikasi pencapaian pada tahun 2022 akan lebih menggambarkan kondisi pembangunan terkini.

- 2) **Pengumpulan data.** Pengumpulan data dan informasi lebih banyak dilakukan secara studi pustaka, kolaborasi dengan beberapa instansi dan dalam jaringan (daring). Diskusi terfokus dilakukan secara daring bersama pemerintah daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda), dan akademisi pada daerah terpilih. Selain itu, pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan kepada Bappeda 34 Provinsi.
- 3) **Cakupan evaluasi.** Cakupan evaluasi berfokus pada pencapaian *on going* dan faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran pengembangan wilayah RKP 2022 di 34 Provinsi. Faktor pendukung atau penghambat yang akan diidentifikasi meliputi kebijakan pendukung, faktor institusi dan eksternal. Selain itu, pada laporan ini akan membahas pembelajaran dari tujuh daerah terpilih dan menggali *lesson learned* daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.
- 4) **Ketersediaan data.** Tantangan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu ketersediaan data pada triwulan III dan belum optimalnya respons daerah terhadap kuesioner menyebabkan informasi yang didapatkan cukup terbatas.

**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**



# BAB II

# Metode Evaluasi dan Mekanisme Pelaksanaan



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

## BAB II

### METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

#### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Evaluasi dalam EKPD 34 Provinsi Tahun 2022 dilakukan dengan *mixed method* kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif terdiri dari penyusunan skoring capaian kinerja pembangunan dan skoring faktor penjelas, sementara analisis kualitatif terdiri dari analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian/Lembaga, maupun data dari masing-masing pemerintah daerah sampel. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kombinasi analisis data sekunder, literature review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta data primer dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilakukan di 7 wilayah terpilih.

**Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis**

Metode	Data	Sumber
<b>Skoring Capaian Kinerja</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BPS
	Tingkat Kemiskinan	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS
	Rasio Gini	BPS
	Indeks Pembangunan Manusia	BPS
<b>Skoring Faktor Pendukung</b>	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	KLHK
	Proporsi PDRB Sektor Primer	BPS
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BNPB
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS
	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	BPS
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BRIN
	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu atau pilkada terakhir	KPU
	Partisipasi Sosial	BPS

Metode	Data	Sumber
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS
	Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	BKPM
	Pertumbuhan PMA dan PDMN	BKPM
	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	Kemenkeu
	Rasio PAD terhadap PDRB ( <i>Local Tax Ratio</i> )	Kemenkeu
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kemenkeu
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Kemenpan RB
	Opini BPK atas LKPD	BPK
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI
<b>Success Case</b>	Informasi kualitatif dari sumber primer	<i>In-depth</i>
<b>Method</b>		<i>Interview, FGD</i>

Sumber: Penulis

## 2.2. Metode Analisis

Kegiatan EKPD tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi tiga tujuan spesifik, yaitu: (1) mengevaluasi pencapaian sasaran RKP Kewilayahan tahun 2022 di 34 provinsi, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kewilayahan, dan (3) mengidentifikasi isu strategis di 34 provinsi. Secara umum, kegiatan EKPD tahun 2022 menggunakan *mixed method* dengan sejumlah metode evaluasi dan analisis antara lain: *Gap Analysis* dan Skoring, dan Analisis Deskriptif.

Berikut adalah uraian mengenai metode analisis EKPD 34 provinsi.

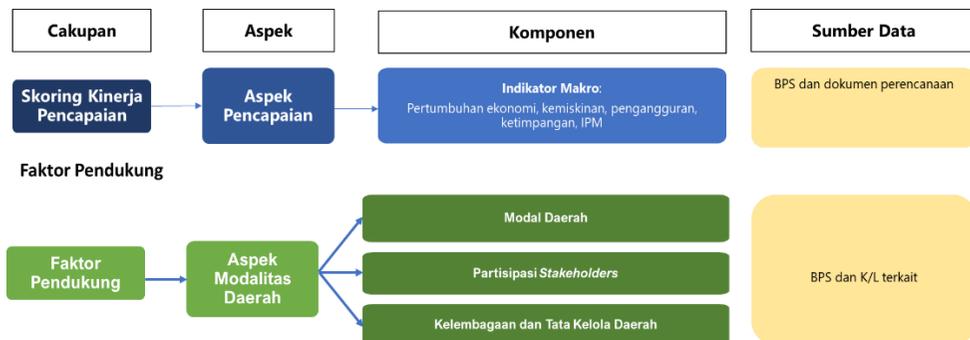
### 2.2.1. *Gap Analysis* dan Skoring Capaian Kinerja

Metode *gap analysis* digunakan untuk melakukan evaluasi pengukuran kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Metode ini membandingkan antara realisasi

capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan sasaran kinerja (apa yang ingin dicapai). Perbedaan antara realisasi capaian dengan sasaran menjadi sumber adanya *gap* antara hasil yang sudah dicapai dengan yang direncanakan, atau kondisi yang terealisasi dengan kondisi yang seharusnya.

Pada EKPD tahun 2022 ini, *gap analysis* dilakukan dengan metode analisis berbasis skoring terhadap capaian kinerja pembangunan dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi skor (faktor penjelas). Gambar di bawah menunjukkan kerangka logis analisis skoring capaian kinerja pembangunan. Dalam menilai EKPD secara kuantitatif, dilakukan metode skoring terhadap realisasi capaian atas 5 (lima) indikator makro yang merupakan sasaran pembangunan kewilayahan (Laju Pertumbuhan, Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan, dan IPM). Selanjutnya, evaluasi ini juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja yang dibagi ke dalam dua aspek: aspek modalitas daerah dan aspek pelaksanaan. Analisis faktor penjelas ini digunakan sebagai basis dalam menjelaskan hasil skoring kinerja pencapaian dari sisi modalitas daerah dan kebijakan, sehingga keunikan setiap daerah dapat tergambar dari faktor tersebut.

**Gambar 2.1 Kerangka Cakupan EKPD**



Sumber: Penulis

Indikator makro terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan (TK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini (RG), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk tiap-tiap provinsi  $i$  dan kombinasi indikator-sasaran  $j^1$ , nilai capaian perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)} : \text{Capaian}_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Target_{ij} - Realisasi_{ij})]}{Target_{ij}}$$

<sup>1</sup> Terdapat 13 kombinasi indikator-sasaran, yaitu LPE-RKP, TK-RKP, TPT-RKP, LPE-RKPD, TK-RKPD, TPT-RKPD, RG-RKPD, IPM-RKPD, LPE-2021, TK-2021, TPT-2021, RG-2021, dan IPM-2021.

Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Realisasi_{ij} - Target_{ij})]}{Target_{ij}}$
--	---	---

Sementara itu, untuk menghitung nilai capaian perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan 2021, digunakan formula sebagai berikut:

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	:	$Capaian_{ij} = \frac{Realisasi_{2022_{ij}} - Realisasi_{2021_{ij}}}{Realisasi_{2021_{ij}}}$
--	---	--

Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	:	$Capaian_{ij} = -1 * \frac{Realisasi_{2022_{ij}} - Realisasi_{2021_{ij}}}{Realisasi_{2021_{ij}}}$
--	---	---

Selanjutnya, *gap analysis* dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian masing-masing indikator berdasarkan data termutakhir dengan tiga nilai pembanding, yaitu (1) target RKP 2022, (2) target RKPD 2022, dan (3) realisasi tahun 2021. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori skor (Merah, Kuning, Hijau). Untuk perbandingan dengan angka pembanding target RKP dan RKPD, kriteria yang digunakan mengacu pada kriteria dalam Laporan Evaluasi RKP oleh Direktorat PEPPS Bappenas. Sementara itu, untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2021, penentuan skor dilakukan berdasarkan distribusi data selisih realisasi tahun 2022 dan 2021. Langkah pertama adalah menghitung selisih antara capaian indikator tahun 2022 dan 2021. Langkah selanjutnya adalah menghitung rentang (*range*) dari nilai selisih untuk tiap-tiap indikator dan membagi nilai rentang tersebut dengan 3 untuk mendapatkan titik potong (*cutoff points*) yang membagi rentang ke dalam tiga bagian. Provinsi dengan nilai selisih di bawah titik potong pertama (nilai minimum + rentang / 3) mendapatkan skor 1. Provinsi dengan nilai selisih antara titik potong pertama dan kedua (nilai maksimum – rentang / 3) mendapatkan skor 2. Provinsi dengan nilai selisih di atas titik potong kedua mendapatkan skor 3. Kriteria skoring untuk masing-masing angka pembanding secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Kriteria Skoring Capaian Kinerja

Angka Perbandingan	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah) Kategori kinerja kurang (target sulit tercapai)	2 (Kuning) Kategori kinerja cukup (perlu kerja keras untuk mencapai target)	3 (Hijau) Kategori kinerja baik ( <i>on track</i> mencapai target)
Target RKP 2022	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan <90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Target RKPD 2022	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan <90% dari Target	Capaian ≥ 90% dari Target
Realisasi Tahun 2021	Selisih < $(\min + (\text{range}/3))$	$(\min + (\text{range}/3)) \leq$ Selisih < $(\max - (\text{range}/3))$	Selisih ≥ $(\max - (\text{range}/3))$

Catatan: *Cutoff points* untuk perbandingan dengan target RKP dan RKPD mengacu pada Laporan Evaluasi RKP dari Direktorat PEPPS Bappenas. *Cutoff points* untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2021 berdasarkan distribusi data.

Untuk membantu menganalisis capaian kinerja di atas, EKPD tahun 2022 melakukan skoring terhadap 18 indikator yang diidentifikasi sebagai faktor pendukung. Skoring terhadap faktor-faktor pendukung dihitung dengan metode skor komposit. Pemilihan indikator berbasis landasan teori mengenai pertumbuhan endogen, studi literatur, dan masukan dari akademisi dan lembaga pemerintahan. Beberapa indikator sudah memiliki metode skoring dan pembagian masing-masing pada peraturan teknisnya. Namun untuk skoring indikator yang belum memiliki aturan, dilakukan dengan melihat distribusi datanya. Tabel dibawah menunjukkan secara lebih rinci kriteria skoring faktor pendukung.

Tabel 2.3 Indikator Faktor Pendukung EKPD 2022

No	Komponen	Dimensi	Indikator	Sumber	Tahun
1	Sumber Daya Daerah	Geografis & Sumber Daya Alam (Geografis)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	KLHK	2021
2			Proporsi PDRB Sektor Primer	BPS	2021
3			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	BPS	2021
4			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS	2018

No	Komponen	Dimensi	Indikator	Sumber	Tahun
5		Sosial Budaya (Sosbud)	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	BPS	2021
6			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	BPS	2021
7	Partisipasi Stakeholders	Partisipasi	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	KPU	2021
8			Indeks Kebahagiaan	BPS	2022
9			Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS	2022
10			Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) - % Perbandingan dengan Nasional	BPS	2022
11		Investasi	Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	BKPM	2022
12			Pertumbuhan PMA dan PMDN	BKPM	2022
13	Kelembagaan dan Tata Kelola	Fiskal	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	Kemenkeu	2021
14			Rasio PAD terhadap PDRB (Tax Ratio)	Kemenkeu	2021
15			Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Kemenkeu	2021
16		Institusi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	BPS	2021
17			Opini BPK atas LKPD	BPK	2021
18			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	2021

Sumber: Penulis

Langkah selanjutnya yaitu, melakukan normalisasi. Indikator faktor pendukung memiliki satuan dan rentang yang bervariasi, maka perlu dilakukan normalisasi atas 18 indikator tersebut. Metode normalisasi yang digunakan adalah *min-max normalization*. Setelah normalisasi, nilai masing-masing indikator berada di rentang 0-1. Terdapat dua indikator dengan arah hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100 ribu Penduduk. Semakin tinggi nilai dua indikator tersebut di suatu daerah, maka semakin tidak kondusif perekonomian daerah tersebut untuk tumbuh sehingga menghambat pencapaian target kinerja makro daerah. Untuk itu, dilakukan penyesuaian terhadap dua indikator tersebut. Untuk tiap indikator X di provinsi  $i$ , maka nilai indikator yang sudah dinormalisasi,  $N_i$ , adalah:

Indikator dengan arah positif : 
$$N_i = \frac{X_i - \min(X_i)}{\max(X_i) - \min(X_i)}$$

Indikator dengan arah negatif

(IRBI dan Risiko Terkena Kejahatan) : 
$$N_i = 1 - \frac{X_i - \min(X_i)]}{\max(X_i) - \min(X_i)}$$

Berdasarkan hasil normalisasi dengan metode di atas skoring faktor pendukung akan bernilai antara 0-1. *Grading* warna digunakan untuk membantu visualisasi dan dilakukan dengan membagi skoring ke dalam 5 bagian sama besar. Skor 0 (*grading* warna merah) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling buruk, sedangkan angka 1 (*grading* warna hijau tua) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling baik.

**Tabel 2. 4 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung**

Warna	Skor Batas Bawah	Skor Batas Atas
Hijau Tua	0,81	1,00
Hijau Muda	0,61	0,80
Kuning	0,41	0,60
Oranye	0,21	0,40
Merah	0,00	0,20

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Setelah itu, agregasi dilakukan dengan menghitung rata-rata seluruh nilai indikator kemudian dikalikan dengan 100. Agregasi juga dapat dilakukan untuk masing-masing dimensi. Setelah agregasi, skor berada di rentang 0-100.

### 2.2.2. Pembelajaran Daerah

Analisis mengenai pembelajaran daerah dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *Success Case Method* (SCM). SCM merupakan salah satu metodologi evaluasi yang dikembangkan oleh Robert Brinkerhoff (2003) untuk menilai apakah suatu program dapat berjalan dengan baik. Dalam implementasinya pada evaluasi kinerja daerah, SCM mencakup identifikasi *the most and least successful cases* terkait pencapaian sasaran RKP kewilayahan di 34 provinsi dan melakukan penelaahan mendalam terhadap dua kasus tersebut. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan metode *in-depth interview* atau *focus group discussion*.

### 2.2.3. Implementasi Konsep Evaluasi

#### (1) Implementasi Skoring Capaian Kinerja dan Analisis Faktor Penjelas

Berdasarkan kerangka logis yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka skoring capaian kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



1. Menghitung *gap* dengan membandingkan realisasi capaian indikator makro dengan target RKP 2022, target RKPD 2022, dan realisasi tahun 2021.
2. Memberikan skor terhadap *gap* capaian indikator makro berdasarkan kriteria skoring yang sudah ditetapkan.
3. Memberikan skor terhadap faktor-faktor penjas berdasarkan kriteria skoring yang sudah ditetapkan.
4. Menganalisis hasil skoring capaian kinerja dan skoring faktor pendukung untuk mengidentifikasi keterkaitan antara keduanya.

## (2) Implementasi *Success Case Method*

Analisis SCM dilakukan dalam lima tahap, yaitu:

1. Menyusun “model dampak” yang mendefinisikan seperti apa kesuksesan itu seharusnya.
2. Mengidentifikasi kasus terbaik dan terburuk yang akan dikaji lebih dalam.
3. Merancang dan mengimplementasikan survei terhadap kasus terbaik dan terburuk.
4. Mewawancarai dan mendokumentasikan kasus terbaik dan terburuk.
5. Membandingkan temuan kasus terbaik dan terburuk.

## 2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan EKPD tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan akademisi. Diagram di bawah memperlihatkan tahapan pelaksanaan EKPD tahun 2022.

**Gambar 2.2 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah**



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**



# BAB III

# Hasil Evaluasi



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

## BAB III HASIL EVALUASI

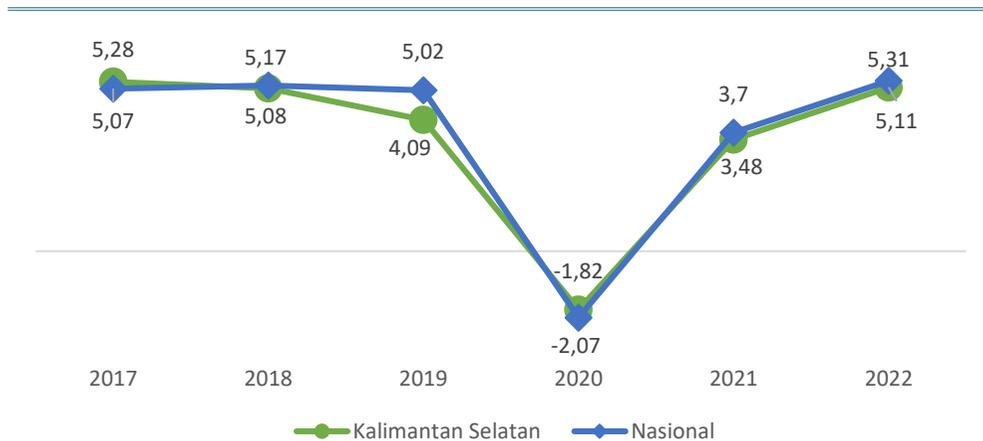
### 3. 1. Gambaran Capaian Makro Daerah

#### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017 hingga 2022 cukup fluktuatif. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan berjalan beriringan dengan capaian nasional selama tahun 2017 hingga 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 5,28 persen, sedangkan tahun 2020 merupakan yang terendah dengan capaian -1,81 persen. Seperti diketahui, pada awal Maret 2020, adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun demikian, pada akhir tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mulai kembali membaik.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,48 persen dan terus membaik di tahun 2022 sebesar 5,31 persen yang didorong oleh perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan mulai membaiknya aktivitas ekonomi global sehingga meningkatkan volume ekspor barang dan jasa komoditas strategis Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga juga turut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sektor lapangan usaha, pertambangan dan penggalian dan pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

**Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan  
2017 – 2021 (Persen)**

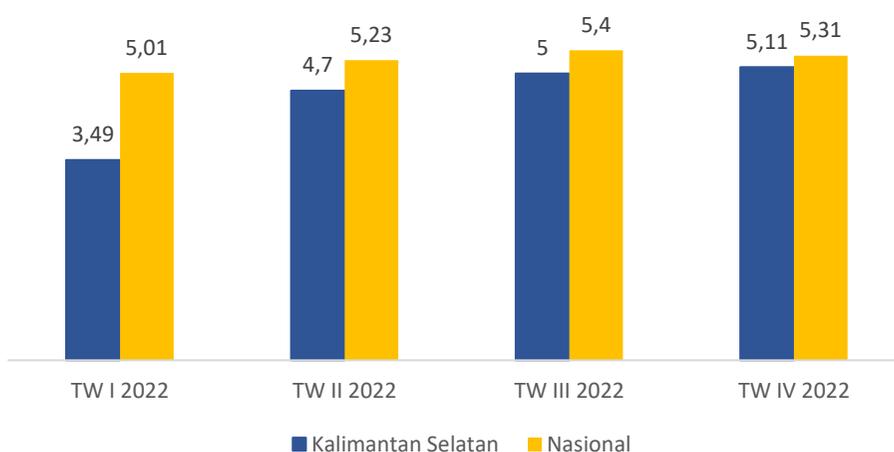


Sumber: BPS, diolah

Selama triwulan I hingga IV tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sampai dengan

triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,11 persen. Hal ini belum lebih baik dibandingkan Nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu transportasi dan pergudangan diikuti penyediaan akomodasi, makan, dan minum. Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu dari impor dan ekspor barang dan jasa. Berikut adalah grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV-2022.

**Gambar 3. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Persen, c-to-c)**



Sumber: BPS, diolah

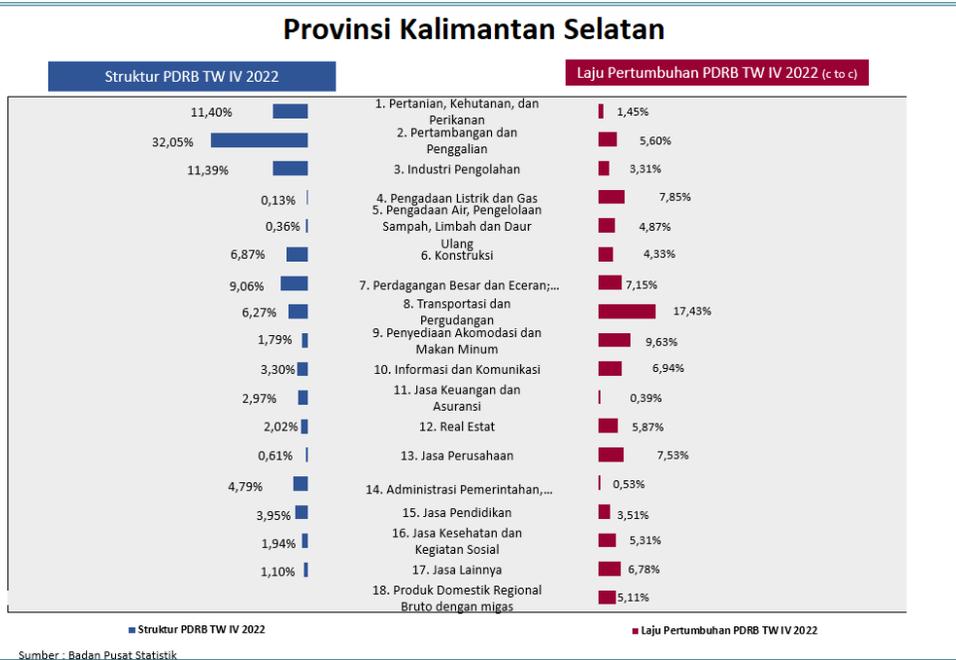
Beberapa program unggulan daerah tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator makro diantaranya: 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya; 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); 3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual; 6) Program Pemberdayaan Sosial; 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk menurunkan angka pengangguran dengan menciptakan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja.

Berdasarkan lapangan usaha, terdapat tiga lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 32,05 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,4 persen; dan industri pengolahan 11,39 persen. Jika dilihat lebih rinci lagi, pada lapangan usaha pertambangan

dan penggalian, subkategori batubara merupakan penyumbang terbesar seiring dengan tingginya harga komoditas di tengah ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Faktor produksi seperti cuaca dan ketersediaan alat berat yang memadai turut mendorong optimalnya kegiatan eksplorasi batubara. Selain itu, harga komoditas yang masih tinggi juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Peningkatan produktivitas padi yang didukung oleh cuaca yang mendukung, mendorong sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Selain itu, dari lapangan usaha industri pengolahan, terjadi peningkatan produksi sawit di sisi hilir. (Bank Indonesia, 2022).

Sampai dengan triwulan IV-2022, tiga lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 17,43 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,63 persen, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 7,85 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut mengalami akselerasi pertumbuhan yang didorong oleh mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Selatan melalui berbagai strategi upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah sehingga mobilitas masyarakat dan barang mulai meningkat, tempat hiburan, dan wisata yang mulai beroperasi kembali. Di sisi lain, tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 0,39 persen, diikuti administrasi pemerintahan yang tumbuh sebesar 0,53 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 1,45 persen.

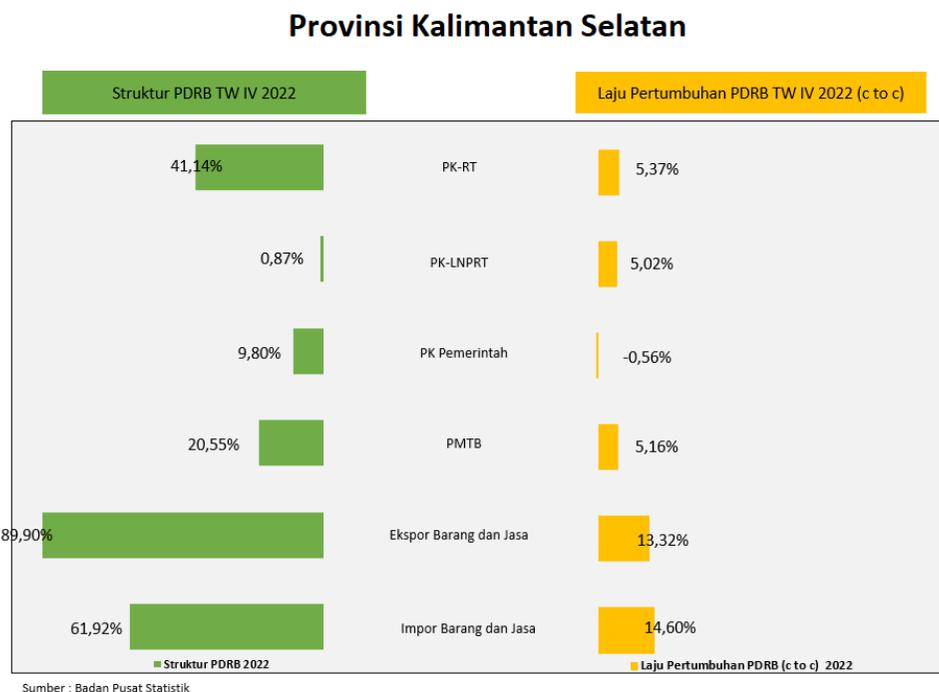
**Gambar 3. 3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan IV-2022**



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komponen pengeluaran, motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV-2022 adalah konsumsi rumah tangga, diikuti oleh investasi/pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan juga Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 14,6 persen; diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 13,32 persen, dan konsumsi rumah tangga sebesar 5,37 persen. Tingginya ekspor dan impor didorong oleh membaiknya permintaan batubara dan CPO dari negara mitra dagang utama. Selain itu, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan sejalan dengan aktivitas dan mobilitas yang berangsur pulih (Bank Indonesia, 2022).

**Gambar 3. 4 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Pengeluaran Triwulan IV-2022**



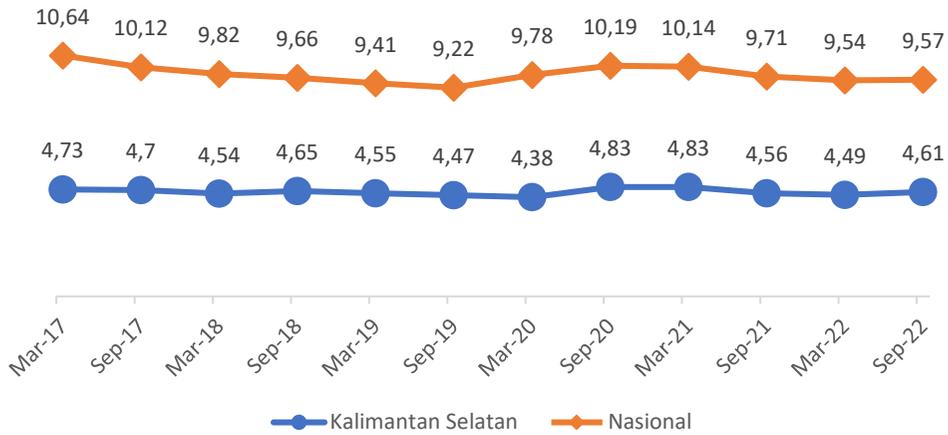
Sumber: BPS, diolah

### 3.1.2. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan fluktuatif, tetapi cenderung stagnan selama periode 2017 hingga September 2022. Capaian tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir selalu berada di bawah pencapaian nasional. Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 4,73 persen dan menurun sampai dengan 4,61 persen pada September 2022. Pencapaian pada September 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar 4,56 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga BBM yang juga turut berkontribusi pada kenaikan inflasi sehingga kemiskinan meningkat.

Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan mengalami peningkatan menggambarkan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan yang semakin membaik dari sisi ekonomi. Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga meningkat mengindikasikan adanya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

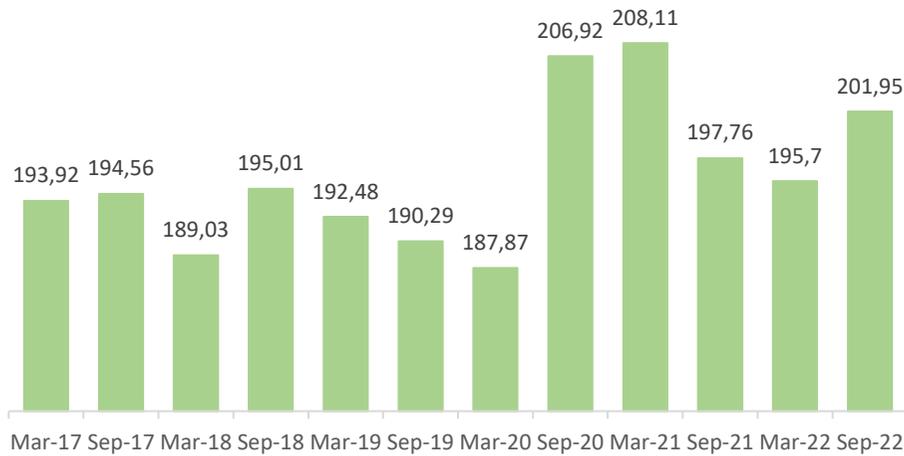
**Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

Selama periode 2017 hingga 2022, jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan cenderung fluktuatif. Jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada September 2022 mencapai 201,95 ribu orang atau turun sebesar 4,19 ribu orang dibandingkan September 2021 yang tercatat sejumlah 197,76 ribu orang. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya harga BBM yang turut berkontribusi cukup besar terhadap tingkat inflasi. Persentase kemiskinan di perkotaan meningkat dari 3,81 persen pada September 2021 menjadi 4,03 persen pada September 2022. Sementara itu, di perdesaan turun dari 5,28 persen menjadi 5,17 persen.

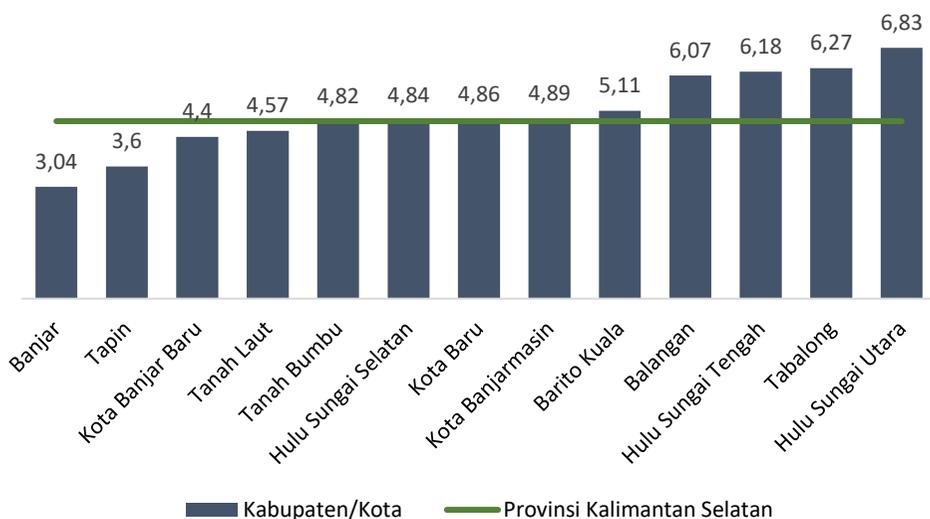
**Gambar 3.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

Penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari upaya pemerintah kabupaten/kota dalam menekan tingkat kemiskinan di daerahnya. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berada di bawah 10 persen. Daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,83 persen diikuti Kabupaten Tabalong sebesar 6,27 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6,18 persen. Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah berada pada Kabupaten Banjar sebesar 3,04 persen, diikuti Kabupaten Tapin sebesar 3,60 persen, dan Kota Banjar Baru sebesar 4,40 persen. Gambar di bawah ini merupakan perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2022.

**Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022**

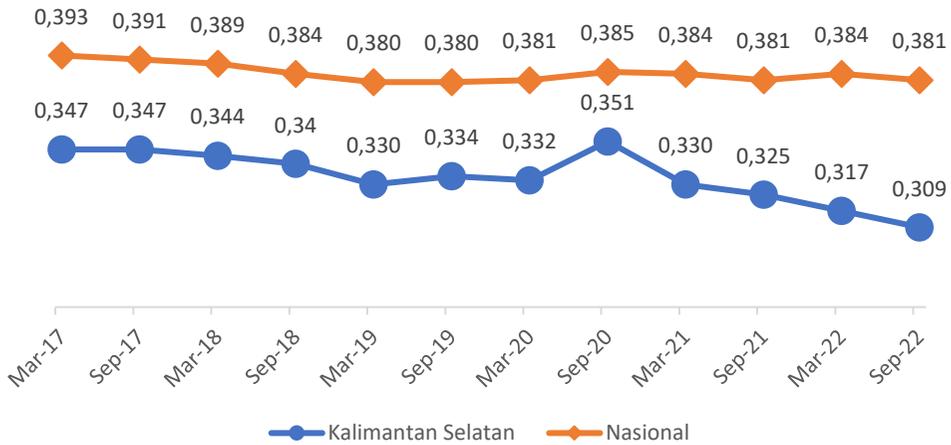


Sumber: BPS, diolah

Selain tingkat kemiskinan, rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Maret 2017 hingga September 2022 terus menurun dan pencapaiannya selalu berada di bawah capaian nasional. Pada September 2022, rasio gini Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,309, menurun 0,016 poin dibandingkan September 2021. Berdasarkan tempat tinggal, rasio gini di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Menurut data BPS, rasio gini di perkotaan mengalami penurunan dari 0,352 pada September 2021 menjadi 0,329 pada September 2022. Sementara rasio gini di perdesaan mengalami peningkatan dari 0,257 pada September 2021 menjadi 0,273 pada September 2022.

Ketimpangan juga dapat diukur dengan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah. Pada ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu “tinggi” jika angkanya di bawah 12 persen, “sedang” jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta “rendah” jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada Maret 2022, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 22,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika diperinci menurut wilayah, daerah perkotaan angka kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 21,16 persen. Pada daerah perdesaan angkanya sebesar 23,64 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah perkotaan maupun perdesaan masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Gambar 3.8 Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 – 2022



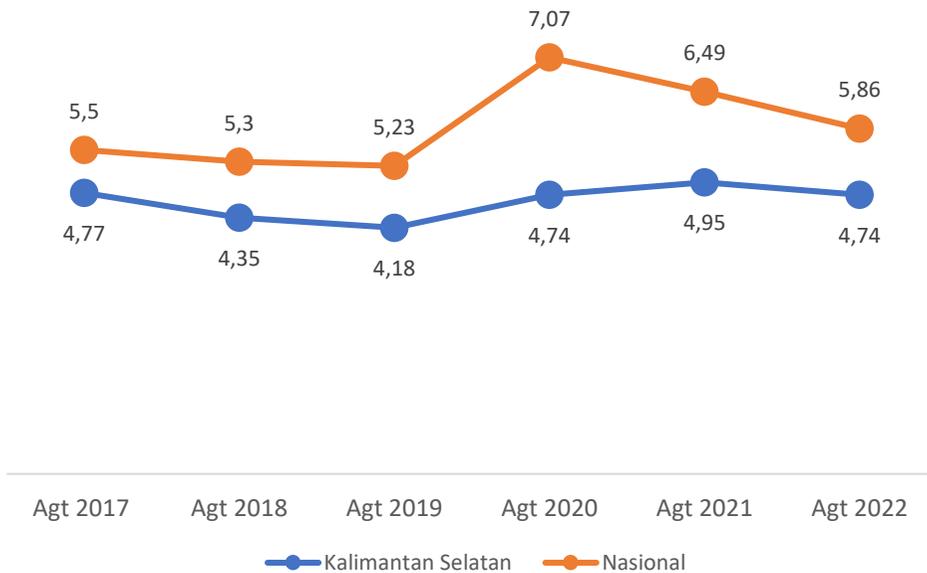
Sumber: BPS, diolah

### 3.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Agustus 2017 hingga Agustus 2022 cukup fluktuatif. Pencapaian TPT Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan pencapaian nasional. Pada Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,74 persen atau turun 0,21 poin persentase dibandingkan Agustus 2021. Penurunan tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Selatan sejalan dengan penurunan Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pekerja cukup signifikan sejalan dengan kenaikan harga jual komoditas batubara internasional. Selain itu, sektor lembaga keuangan juga mengalami kenaikan pekerja seiring dengan kenaikan pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat dan usaha (Bank Indonesia, 2022).

Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka terbesar disumbang oleh angkatan kerja dengan tamatan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), diikuti dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemda provinsi sudah melakukan beberapa program unggulan seperti peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja serta program-program pelatihan dan produktivitas kerja. Berikut adalah perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2017 – 2022.

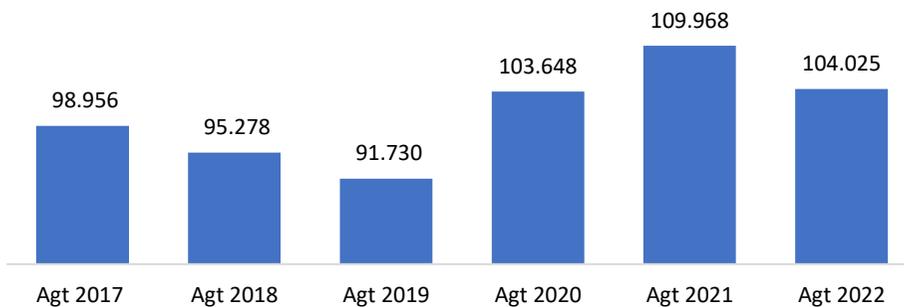
**Gambar 3.9 Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022 (Persen)**



Sumber: BPS, diolah

Jumlah penganggur Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017-2022 cukup fluktuatif dan ada kecenderungan mengalami penurunan sejak Agustus 2021. Pada Agustus 2022, jumlah menganggur di Kalimantan Selatan mencapai 104 ribu orang, turun sekitar 6 ribu orang dibandingkan Agustus 2021. Pengangguran dari tamatan SMA merupakan yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, perlu untuk strategi penanganan dan perhatian yang lebih untuk pengangguran tamatan SMA.

**Gambar 3.10 Perkembangan Jumlah Penganggur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022**

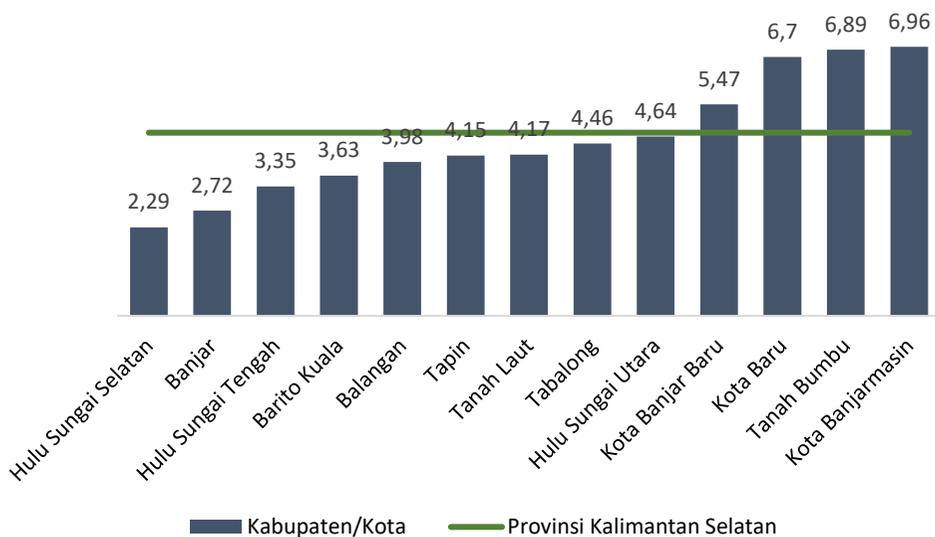


Sumber: BPS, diolah

Penurunan tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Selatan tidak lepas dari upaya kabupaten/kota dalam menekan tingkat pengangguran terbuka di daerahnya. Pada Agustus

2022, tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berada di bawah 10 persen. Daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu Kota Banjarmasin sebesar 6,96 persen diikuti Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 6,89 persen, dan Kabupaten Kota Baru sebesar 6,70 persen. Sementara itu, daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah berada pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 2,29 persen, diikuti Kabupaten Banjar sebesar 2,72 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,35 persen. Ketiga kabupaten dengan tingkat pengangguran terendah tersebut capaiannya dibawah capaian tingkat pengangguran provinsi Kalimantan Selatan. Gambar di bawah ini merupakan perbandingan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2022.

**Gambar 3.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Persen)**

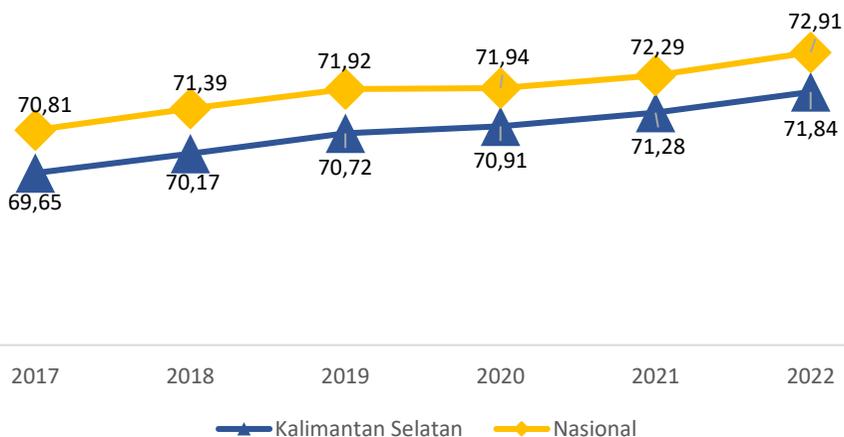


Sumber: BPS, diolah

### 3.1.4. Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2017 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia tahun 2022 tercatat sebesar 71,84, meningkat 0,56 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan tersebut didukung oleh semua dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Namun demikian, IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah Nasional meskipun status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sudah berstatus “tinggi”.

**Gambar 3.12 Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2022**



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komponen IPM, pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2022 didorong oleh semua dimensi. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 masih berada di bawah Nasional. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Nasional. Kemudian, pertumbuhan semua dimensi IPM yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih baik.

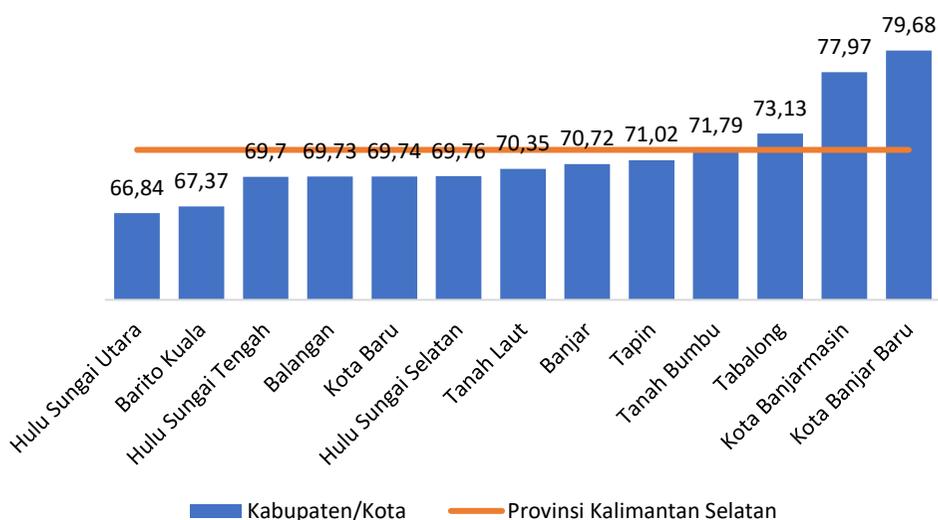
**Tabel 3.1 Komponen Pendukung IPM**

Dimensi	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022	
		Kalimantan Selatan	Nasional	Kalimantan Selatan	Nasional
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,83	71,57	69,13	71,85
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,81	13,08	12,82	13,10
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,34	8,54	8,46	8,69
Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) (Rp000)	12.143	11.156	12.469	11.479

Sumber: BPS, diolah

Pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari pencapaian IPM di kabupaten/kota. Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan cukup bervariasi. Indeks pembangunan manusia tertinggi berada pada Kota Banjar Baru sebesar 79,68 diikuti dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, IPM terendah berada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara diikuti Kabupaten Barito Kuala. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki status pembangunan manusia “tinggi”.

**Gambar 3.13 Pencapaian IPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022**



Sumber: BPS, diolah

### 3. 2. Skoring Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, analisis skoring dilakukan dengan membandingkan capaian tahun 2022 dengan sasaran pada RKP 2022 dan RKPD 2022, serta realisasi capaian pada 2021. Pada perbandingan dengan RKP 2022, hanya ada tiga indikator yang diperbandingkan yakni laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan capaian kinerja, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan total skor 9 dari nilai maksimal 9, jika dibandingkan dengan sasaran pada RKP 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian target dari ketiga indikator tersebut sudah sangat baik. Dari nilai skor, baik LPE, TK, dan TPT mendapatkan skor poin 3. Jika dilihat lebih detail, ketiga indikator tersebut sudah mencapai target RKP 2022.

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja terhadap Target RKP 2022**

Indikator	Capaian 2022	Indikator Pemandangan								
		Sasaran RKP 2022			Sasaran RKPD 2022			Realisasi 2021		
		Target	Capaian Kinerja	Skor	Target	Capaian Kinerja	Skor	Capaian 2021	Capaian Kinerja	Skor
LPE (%)	5,11	4,50	113%	3	4,00	127%	3	3,48	0,798	3
TK (%)	4,61	4,60	100%	3	4,60	100%	3	4,56	0,015	2
TPT (%)	4,74	4,91	103%	3	4,39	92%	3	4,95	0,042	1
RG	0,309	-	-	-	0,33	106%	3	0,325	0,025	2
IPM	71,84	-	-	-	72,46	99%	3	71,28	0,008	2
Skor Akhir	9/9			15/15			10/15			
	34/39 * 100 = 91									

Sumber: Hasil EKPD 2022

\*) = Skor akhir merupakan akumulasi total skor yang sudah diberi bobot penilaian

Pada skoring capaian kinerja dengan sasaran RKPD tahun 2022, terdapat dua tambahan indikator yang dinilai yakni rasio gini dan IPM. Berdasarkan hasil skoring, total nilai yang diperoleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 15 dari 15 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian target dari kelima indikator tersebut sudah sangat baik dengan dengan sasaran RKPD 2022 yang telah ditentukan. Dari kelima indikator di atas, Provinsi Kalimantan Selatan sudah mencapai target yang diharapkan pada RKPD 2022 kecuali indikator TPT dan IPM.

Sementara dari skoring capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 melalui skoring delta, kinerja Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan total skor 10 dari 15. Indikator yang mendapatkan skor tertinggi hanya ada pada indikator LPE yang meningkat dari capaian pada tahun sebelumnya. Sementara itu, indikator lainnya mendapatkan poin 2, kecuali indikator TK mendapatkan poin 1.

### 3.3. Analisis Faktor Pendukung

#### a. Komponen Sumber Daya Daerah

Dalam aspek Modalitas Daerah, terdiri dari komponen Sumber Daya Daerah, Partisipasi *Stakeholders*, serta Tata Kelola dan Kelembagaan. Komponen Sumber Daya Daerah terbagi menjadi dua dimensi, yaitu Geografis dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sosial Budaya. Indikator eksisting yang digunakan untuk mengukur dimensi Geografis dan SDA adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indikator IKTL dapat menjelaskan bagaimana

kualitas tutupan lahan di sebuah provinsi, dengan membandingkan luas hutan dengan total luas wilayah administratif di provinsi tersebut. Dengan indikator ini, kita dapat melihat bahwa suatu daerah memiliki wilayah hijau yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

Indikator lainnya yang termasuk ke dalam Dimensi Geografis dan SDA adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Proporsi PDRB sektor primer terhadap total PDRB. IRBI berguna untuk melihat seberapa besar risiko sebuah daerah terhambat pembangunan ekonominya dikarenakan oleh gangguan bencana. Sementara itu, Proporsi PDRB sektor primer berguna untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi sebuah daerah bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya.

Dimensi Sosial Budaya dijelaskan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indikator ini dapat mencerminkan faktor-faktor dalam isu sosial budaya yang dapat menghambat sebuah daerah untuk berkembang. Perbandingan tingkat daya saing daerah dijelaskan oleh indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dapat mencerminkan faktor-faktor apa saja yang menjadi ukuran sebuah daerah dapat bersaing dengan daerah lainnya. Tabel di bawah ini merupakan hasil skor komponen sumber daya daerah untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 3.3 Skor Komponen Sumber Daya Daerah**

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Geografis & SDA	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	50,30	0,33	0,39
	Proporsi PDRB Sektor Primer	0,33	0,62	
	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	141,70	0,22	
Sosial Budaya	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	75,40	0,57	0,34
	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk	196,00	0,44	
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	0,10	0,00	

Sumber: Penulis

Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 memiliki skor dimensi Geografis dan SDA sebesar 0,39 dan skor dimensi Sosial Budaya sebesar 0,34. Capaian IKTL Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 50,30. Selain itu, untuk proporsi PDRB sektor primer sebesar 0,33 dan IRBI sebesar 141,70. Pada Dimensi Sosial Budaya, IDI Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 75,40, Risiko penduduk terkena kejahatan per 100 ribu penduduk mencapai angka 196, dan IDSD sebesar 0,10. Angka capaian tersebut kemudian dinormalisasi sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Dari sisi Modalitas Daerah, dimensi Geografis dan SDA menjadi faktor dengan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan dimensi Sosial Budaya. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki modal sosial dan budaya yang kuat yang didorong oleh skor IDI yang tinggi, dan daerah yang relatif aman dari kejahatan. Di sisi lain, dalam dimensi



Geografis dan SDA, skor Proporsi PDRB Sektor Primer yang tinggi mencerminkan bahwa capaian kinerja makro Provinsi Kalimantan Selatan banyak ditopang oleh kondisi geografisnya ataupun kepemilikan sumber daya alam di wilayahnya.

## b. Komponen Partisipasi *Stakeholders*

Pemerintah daerah perlu melakukan sinergi dengan seluruh *stakeholders* untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan secara maksimal. Partisipasi aktor nonpemerintah yang tinggi dapat memberikan masukan atas strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengukur partisipasi *stakeholders* dalam pembangunan daerah, kajian ini membagi komponen tersebut ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi Partisipasi dan dimensi Investasi.

Dimensi Partisipasi mengukur derajat peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan adalah tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir, partisipasi sosial (Indeks Kebahagiaan), persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP), dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP). Keempat indikator ini memiliki fungsi utama untuk menangkap partisipasi masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, dimensi Investasi mengukur derajat peran serta sektor swasta dalam pembangunan daerah. Indikator yang digunakan adalah total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta pertumbuhan PMA dan PMDN. Kedua indikator tersebut menggambarkan bagaimana partisipasi sektor bisnis baik domestik maupun internasional dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pembangunan di daerah. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan tabel di bawah, terlihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu terakhir mencapai 83 dari 100 persen, partisipasi sosial mencapai 73,48 dari 100 persen, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP) 94 dari 100 persen, dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP) mencapai 79 dari 100 persen. Sementara dari sisi investasi, realisasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan hingga kuartal III 2022 mencapai Rp 10,78 triliun. Angka tersebut meningkat 13,36 persen dari periode yang sama tahun 2021. Tabel di bawah memberikan informasi lebih detail mengenai skoring modalitas daerah komponen partisipasi *stakeholders*.

**Tabel 3.4 Skor Komponen Partisipasi *Stakeholders***

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Partisipasi	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu atau pilkada terakhir	83,00	0,28	0,37

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
	Partisipasi Sosial	73,48	0,65	
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (IPP)	0,94	0,36	
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (IPP)	0,79	0,18	
Investasi	Realisasi PMA dan PDMN (Triliun Rp)	10,78	0,07	0,17
	Pertumbuhan PMA dan PMDN (%)	13,36	0,27	

Sumber: Penulis

Hasil skoring atas indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian makro Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 ditopang oleh peran swasta yang cukup tinggi. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan cenderung rendah relatif terhadap provinsi-provinsi lain.

### c. Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah

Selain sumber daya dan partisipasi, aspek kelembagaan dan tata kelola daerah juga memiliki peran penting dalam menentukan capaian pembangunan suatu daerah. Kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi di suatu daerah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator makro lain. Untuk mengukur kualitas kelembagaan dan tata kelola, laporan ini menggunakan dimensi Fiskal dan dimensi Institusi.

Dimensi Fiskal diukur melalui indikator Rasio Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD, Rasio Realisasi PAD terhadap PDRB (*local tax ratio*), dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Indikator Rasio Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD digunakan untuk menangkap kemampuan pemerintah daerah dari sisi sumber daya keuangan dalam membiayai program/kegiatan yang direncanakan. Indikator Rasio Realisasi PAD terhadap PDRB digunakan untuk menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan mereka sendiri untuk membiayai program/kegiatan. Sementara indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) mengukur seberapa besar kemampuan daerah untuk membiayai program/kegiatan yang dapat menstimulus perekonomian daerah.

Dimensi Kelembagaan dan Tata Kelola diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan nilai kepatuhan standar pelayanan publik. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN,



dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas sebagai salah satu modalitas pembangunan daerah. Dengan melihat Opini BPK atas LKPD, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dapat diukur. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal juga dapat terlihat dari indikator ini. Sementara indikator nilai kepatuhan standar pelayanan publik berguna untuk menilai apakah sebuah daerah melakukan pelayanan publik dengan baik dan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku. Standar Pelayanan Publik merupakan hal dasar yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Daerah dengan pelayanan publik yang baik seharusnya memiliki kondisi yang lebih kondusif bagi investasi dibandingkan dengan daerah yang kurang baik. Tabel di bawah memberikan informasi lebih detail mengenai skoring modalitas daerah komponen kelembagaan dan tata kelola daerah.

**Tabel 3.5 Skor Komponen Kelembagaan dan Tata Kelola Daerah**

Dimensi	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Dimensi
Fiskal	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD	1,01	1,00	0,64
	Rasio PAD terhadap PDRB ( <i>Tax Ratio</i> )	0,03	0,87	
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,71	0,05	
Institusi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,70	0,20	0,61
	Opini BPK atas LKPD	5,00	1,00	
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	79,31	0,65	

Sumber: Penulis

Capaian rasio realisasi belanja terhadap anggaran APBD Provinsi Kalimantan Selatan adalah 1,01 (101 persen), Rasio PAD terhadap PDRB adalah 0,03 (3 persen), dan nilai IKFD sebesar 0,71. Selanjutnya, IRB menunjukkan capaian sebesar 59,70. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali dalam lima tahun terakhir, serta nilai kepatuhan standar pelayanan publik sebesar 79,31.

Dari sisi fiskal, Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan sangat efektif dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja daerah sesuai dengan APBD. Hal ini tercermin dari skor indikator tersebut yang relatif tinggi. Namun demikian, dukungan dari sisi kapasitas fiskal daerah cenderung lemah. Dari sisi institusi, ketiga indikator memberikan indikasi bahwa kelembagaan dan tata kelola daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup baik.

### 3. 4. Hasil Skoring Faktor Pendukung

Hasil agregasi atas skor indikator, skor dimensi, dan skor komponen digunakan sebagai basis menghitung skor Faktor Pendukung. Skor Faktor Pendukung Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 adalah 43. Berdasarkan tiga komponen pembentuknya, skor komponen Tata Kelola Daerah memperoleh skor tertinggi, disusul komponen Sumber Daya Daerah, dan komponen Partisipasi *Stakeholders*. Dengan demikian, faktor tata kelola daerah yang memiliki peran dalam menopang capaian kinerja makro Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022.

Tabel 3.6 Agregasi Skoring Indikator Faktor Pendukung Provinsi Kalimantan Selatan

Dimensi	Skor Dimensi	Komponen	Skor Komponen	Faktor Pendukung	Skor Faktor Pendukung
Geografis dan SDA	0,39	Sumber Daya Daerah	0,36	Faktor Pendukung	0,43 * 100 = 43
Sosial Budaya	0,34				
Partisipasi	0,37	Partisipasi <i>Stakeholders</i>	0,27		
Investasi	0,17				
Fiskal	0,64	Tata Kelola Daerah	0,63		
Institusi	0,61				

Sumber: Penulis

### 3. 5. Analisis Deskriptif Dukungan Daerah

Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional maupun sasaran pembangunan daerah, tidak terlepas dari kontribusi atau dukungan daerah. Pada kegiatan EKPDP tahun 2022 ini, telah dilakukan pemetaan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran makro daerah dan juga terhadap tujuh Prioritas Nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, alokasi APBD Provinsi Kalimantan Selatan paling tinggi untuk mendukung pencapaian indikator IPM yaitu sebesar 40,79 persen diikuti indikator tingkat kemiskinan sebesar 36,01 persen dan rasio gini sebesar 20,37 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan IPM, penurunan tingkat kemiskinan, dan mengurangi tingkat ketimpangan. Sementara itu, alokasi dukungan daerah terhadap tujuh prioritas nasional yaitu pada PN 3 “Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing” sebesar 35,33 persen diikuti dukungan pada PN 2



“Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan” sebesar 20,37 persen.

### 3. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2022, laporan ini mengidentifikasi sejumlah isu strategis/permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, masih tingginya angka pencari kerja. Merebaknya pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2022 membuat banyak penduduk masih kesulitan mencari kerja dikarenakan adanya *scarring effect* di beberapa sektor. Kedua, adanya perlambatan penurunan kemiskinan pada beberapa tahun terakhir. Ketiga, Menurunnya kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian. Pelaku UMKM mengeluhkan penjualan menurun dan distribusi terhambat akibat pandemi Covid-19. Keempat, adanya kerusakan lingkungan berupa pencemaran air, lubang tambang, dan deforestasi sebagai akibat dari aktivitas tambang. Kelima, Optimalisasi mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan. Keenam, kemandirian infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi termasuk energi dan konektivitas. Ketujuh, diversifikasi sektor ekonomi di Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi. Kedelapan, struktur ekonomi daerah masih perlu dioptimalkan, seperti pertanian, pariwisata, UMKM. Selain itu, hilirisasi dari komoditas tambang unggulan juga perlu ditingkatkan.



# BAB IV

# Kesimpulan dan Rekomendasi



**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali sektor jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2022 adalah transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi. Lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan adalah pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian diikuti oleh industri pengolahan.
- Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup stagnan selama periode 2017 hingga Maret 2022 dan sudah berada di bawah capaian nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penurunan pandemi kasus Covid-19, peningkatan aktivitas sosial, ekonomi dan penurunan pengangguran berkontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan. Selain itu, angka rasio gini Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 2022 telah menurun dibandingkan dengan tahun 2021.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode Agustus 2017 hingga Agustus 2022 cukup fluktuatif dan menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pencapaian TPT Kalimantan Selatan sudah lebih rendah dibandingkan nasional. Pada Agustus 2022, TPT Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 4,74 persen, lebih rendah dari TPT Agustus 2021 sebesar 4,95 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan pekerja cukup signifikan sejalan dengan kenaikan harga jual komoditas batubara internasional.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2017 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Indeks pembangunan manusia tahun 2022 tercatat sebesar 71,84, mengalami peningkatan di mana tahun 2021 IPM sebesar 71,28. Akan tetapi, IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah nasional dengan status pembangunan manusia pada kategori “tinggi”. Namun demikian, ketimpangan pembangunan manusia antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru terhadap daerah lainnya masih cukup lebar.

Sepanjang tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan kinerja makro yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara capaian indikator makro dengan target baik RKP kewilayahan maupun target RKPD. Selain itu, apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, capaian 2022 mengalami perbaikan kinerja. Hasil analisis terhadap Faktor Pendukung mengindikasikan bahwa capaian kinerja makro Provinsi Kalimantan Selatan ditopang oleh aspek Tata Kelola Daerah. Sementara, peran komponen Partisipasi *Stakeholders* relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.

#### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi bagi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- Peningkatan daya saing perekonomian daerah dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan. Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang besar seperti sektor pertanian perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui kontrol harga serta bantuan pemasaran dan pembiayaan dari pemerintah.
- Penguatan dan integrasi data kemiskinan supaya pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran, mengingat terdapat perlambatan penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Selain itu, penguatan sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dari kalangan penduduk dari distribusi pendapatan terbawah perlu mendapatkan pengawasan untuk menjaga harga jual produk pertanian dan juga daya beli petani.
- Sektor pertambangan merupakan penyumbang porsi PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar, namun belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, melalui kemudahan perizinan investasi dan insentif-insentif lainnya supaya tenaga kerja berketerampilan rendah bisa terserap dengan optimal.
- Mendorong perbaikan dan tersedianya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di luar dua kota besar Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjar Baru.
- Penguatan infrastruktur, konektivitas, dan juga pengelolaan transisi sumber daya ekonomi menuju energi terbarukan. Hal ini penting mengingat minyak dan batubara terbatas serta isu perubahan iklim, sehingga perlu adanya mekanisme transisi menuju energi terbarukan



# BAB V

# Studi Kasus

# Daerah



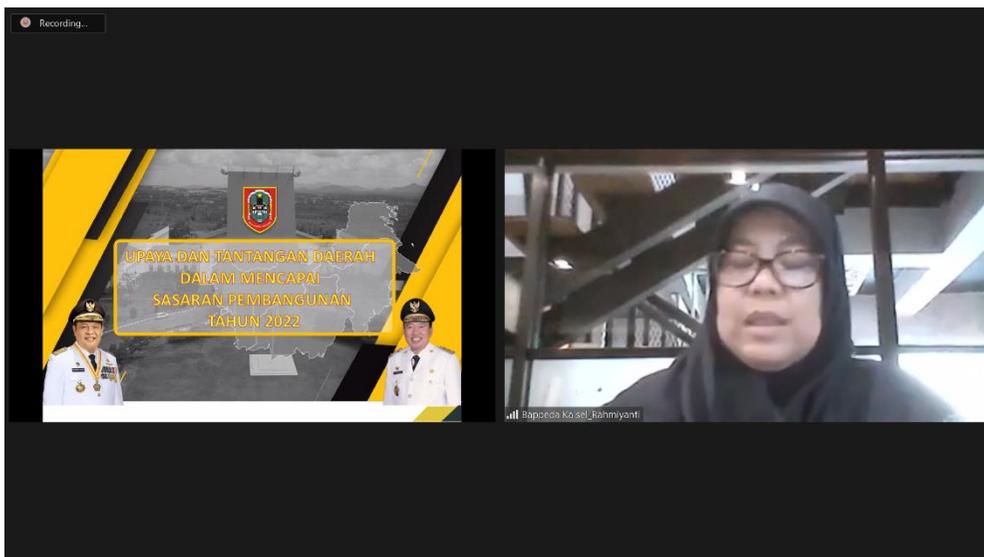
**“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”**

## BAB V

### STUDI KASUS DAERAH

#### 5.1. Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman EKPD 2022 “Pencapaian Sasaran Pembangunan Makro Daerah”

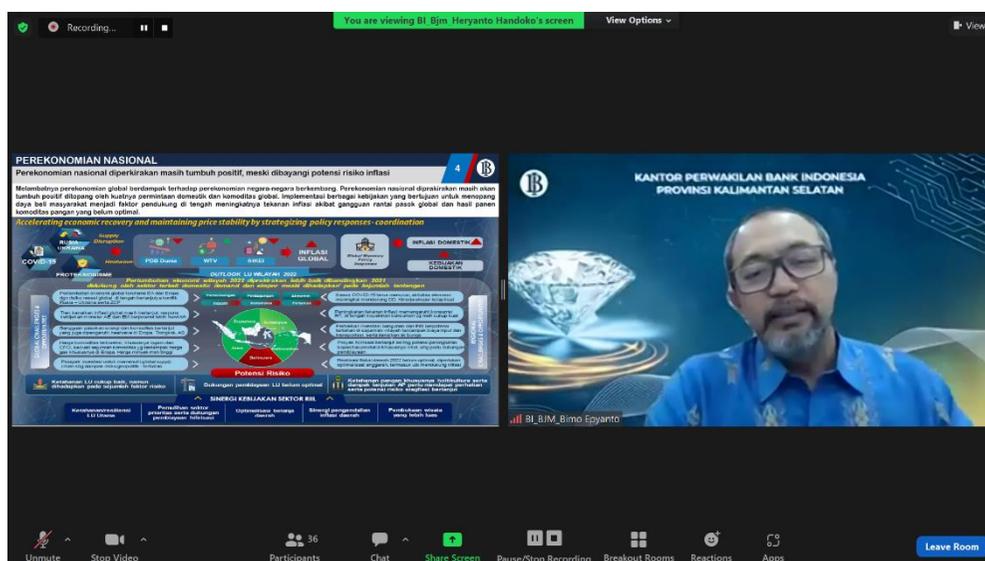
Pembelajaran untuk perbaikan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah tahun 2022 ini diawali dengan melihat pencapaian sasaran pembangunan makro daerah tahun 2022. Pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 5,23 persen ke 5,4 persen (*c-to-c*) yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan. Kondisi tersebut mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah capaian nasional. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga dan net ekspor sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Selain itu, harga komoditas di pasar dunia yang menjadi andalan ekspor Provinsi Kalimantan Selatan masih tinggi, yaitu batubara dan CPO sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.



**Gambar 1.** FGD EKPD – Pemaparan Materi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam FGD Pendalaman EKPD 2022 Desk Provinsi Kalimantan Selatan (27/10)

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup bergantung terhadap sumber daya alam, terutama batubara dan CPO. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 28 persen. Hal ini memicu permasalahan lingkungan, di mana pertambangan batubara meninggalkan bekas-bekas

lahan tambang yang tidak dikelola dengan baik yang menimbulkan banjir. Terlebih lagi ada beberapa komoditas sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi ekonomi namun belum dapat dioptimalkan. Selain itu, ekspor yang dilakukan masih batubara mentah, sehingga perlu didorong proses hilirisasi industri pertambangan. Hilirisasi batubara berpotensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor dan juga aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu bentuk hilirisasi yang bisa dilakukan seperti *Coal Upgrading* dan Gasifikasi *Coal to Methanol*. Kemudian, tingginya harga batubara dan CPO saat ini sebagai akibat dari berkurangnya pasokan global akibat isu geopolitik Rusia-Ukraina. Tingginya harga tersebut tidak akan berlangsung lama, yang artinya akan ada perlambatan ke depannya sehingga perlu memperkuat sektor yang berpotensi di daerah. Apabila mengandalkan ekspor, maka faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.



**Gambar 2.** FGD EKPD – Bapak Bimo Epyanto dari Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan paparan dalam FGD Pendalaman EKPD 2022 Desk Provinsi Kalimantan Selatan (27/10)

Isu kemiskinan menjadi isu penting dan menjadi perhatian Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun sudah lebih baik dari capaian nasional, namun tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan cukup stagnan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,73 persen, sementara pada Maret 2022, tingkat kemiskinan sebesar 4,49 persen. Meskipun lebih baik dari tingkat kemiskinan September 2021 sebesar 4,56 persen, namun penurunan kemiskinan perlu dioptimalisasi. Hal ini dikarenakan kemiskinan cukup berkaitan dengan indikator-indikator lain, seperti prevalensi *stunting* di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih tinggi. Selain itu, terdapat perbedaan antara tingkat kemiskinan perkotaan dan perdesaan Provinsi Kalimantan Selatan,

di mana kemiskinan perdesaan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan.

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2022, IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,84, masih di bawah nasional sebesar 72,91. Meskipun tipis di bawah nasional, namun masih ada selisih yang terbilang besar pada komponen Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 69,13, sementara capaian nasional sebesar 71,85. Ada banyak faktor yang menjelaskan hal ini, terutama dari sisi ibu hamil dan juga balita.

\*\*\*

## 5.2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kalimantan Selatan

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4 persen pada triwulan III tahun 2022. Angka ini semakin membaik dibandingkan tahun 2020 dan 2021, seiring dengan upaya – upaya pemulihan ekonomi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka pengangguran mengalami penurunan dari 4,95 persen di tahun 2021 menjadi 4,74 persen di tahun 2022. Untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 4,56 persen pada September 2021 menjadi 4,49 persen pada Maret 2022. Peningkatan pada indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari sejumlah agenda percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti mendorong investasi peningkatan ekspor.



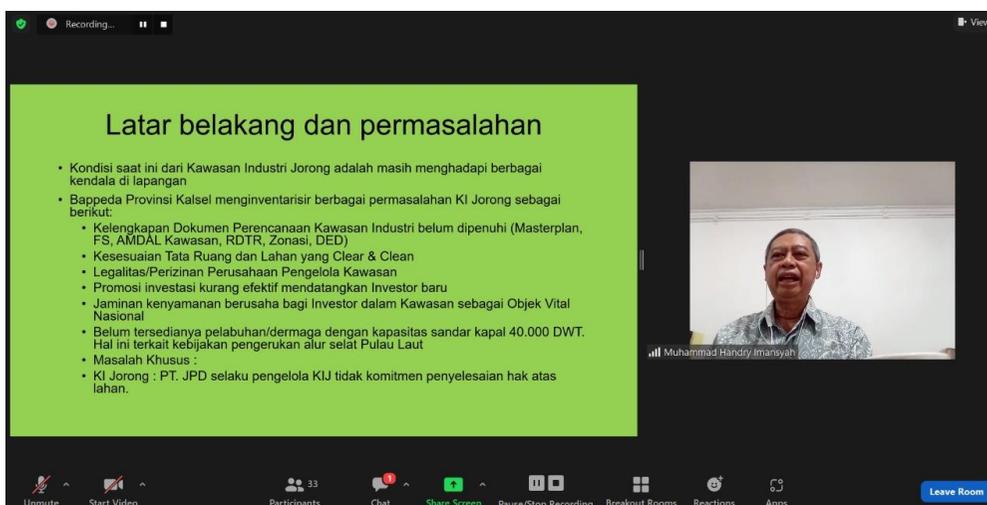
**Gambar 3.** FGD EKPD – Bappeda Kabupaten Tanah Laut memberikan paparan dalam FGD Terfokus Evaluasi Kebijakan 2022 Desk Provinsi Kalimantan Selatan (28/10)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki rencana pengembangan Kawasan Industri di 6 klaster wilayah untuk mendorong perekonomian Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu:

1. KPI Seradang
2. KI Batulicin
3. KEK Mekar Putih
4. TIIFE (Tapin Integrated Industrial & Port Estate)
5. Rencana KIT Mantuil
6. KI Jorong

Akan tetapi, pembangunan Kawasan Industri tersebut masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti:

1. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Kawasan Industri belum dipenuhi (Masterplan, Feasibility Studies, AMDAL Kawasan, Rencana Detail Tata Ruang, Zonasi, dan Detail Engineering Design)
2. Kesesuaian Tata Ruang dan Lahan yang Clear & Clean
3. Legalitas/perizinan perusahaan pengelola kawasan
4. Promosi investasi kurang efektif mendatangkan investor baru
5. Jaminan kenyamanan berusaha bagi investor dalam kawasan sebagai Objek Vital Nasional
6. Belum tersedianya pelabuhan/dermaga dengan kapasitas standar kapal 40.000 DWT. Hal ini terkait kebijakan pengerukan alur selat pulau laut
7. Permasalahan khusus KI Jorong: PT. JPD selaku pengelola KIJ tidak komitmen dalam penyelesaian hak atas lahan



**Gambar 4.** FGD EKPD – Bapak Handry Imansyah selaku akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat memberikan paparan dalam FGD Terfokus Evaluasi Kebijakan 2022 Desk Provinsi Kalimantan Selatan (28/10)

KI Jorong sudah memiliki landasan hukum berupa Perda No. 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kalimantan Selatan, salah satunya adalah KI Jorong yang berlokasi di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. KI Jorong masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga perlu didorong untuk percepatannya. KI Jorong ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 17 miliar yang diperkirakan mampu menyerap 250.000 tenaga kerja. KI Jorong berspesialisasi untuk mendukung komoditas industri besi, baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan turunannya, kepelabuhan, maritim dan energi yang meliputi administrasi pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Saat ini, ada dua perusahaan yang berlokasi di kawasan Industri Jorong, yaitu PT Delta Prima Steel yang memproduksi besi dan baja, serta PT GKJ Pulp & Kertas yang bergerak di bidang industri pengolahan kertas.

Terdapat beberapa kendala infrastruktur yang saat ini dihadapi dalam proses pengembangan KI Jorong. Perlu adanya peningkatan status pelabuhan yang saat ini dikelola oleh Kemenhub melalui UPP kelas 3 Kintap. Saat ini, kapasitas pelabuhan masih dibatasi maksimal 1000 ton, padahal sudah terdapat jetty untuk kapal yang mampu menampung barang hingga 8000 ton, sehingga status pelabuhan perlu ditingkatkan menjadi pengumpan regional, bukan pengumpan lokal. Hal ini penting mengingat jika wilayah Penajam Paser Utara menjadi Ibu Kota Negara (IKN), maka Kabupaten Tanah Laut yang menjadi salah satu pintu gerbang akses distribusi pangan. Selain dari aspek pelabuhan, hambatan yang dialami dalam mendorong proses pengembangan KI Jorong adalah jalan raya. Hal ini perlu dukungan dari pemerintah pusat.

Selain tantangan dalam infrastruktur, KI Jorong dihadapkan pada permasalahan pengelolaan. KI Jorong sudah beberapa kali melakukan pergantian pengelola, di mana saat ini dikelola oleh PT Wahyu Putera Ramadhan (PT WPR). Sebelumnya, KI Jorong dikelola PT Jorong Port Development (PT JPD), namun perusahaan tersebut tidak komitmen terhadap pembebasan lahan, penyusunan masterplan, AMDAL, dan dokumen perizinan lainnya, serta pembatalan SK. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga sempat menawarkan beberapa perusahaan untuk menjadi pengelola KI Jorong, seperti PT Jababeka dan PT Mandiri Plan, namun masih belum ada tindak lanjut. PT Mandalapratama juga sempat berminat namun tetap belum menunjukkan keseriusan terkait bagaimana rencana pengelolaan kedepannya.

Permasalahan lain yang muncul adalah dari segi perizinan dan tata kelola. Secara umum, kondisi fisik sudah cukup baik namun dari sisi regulasi masih menghambat, sehingga perlu pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Beberapa dokumen masih terhambat penyusunannya, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Saat ini, pemerintah provinsi sedang berkoordinasi dengan K/L terkait untuk penyusunan RDTR. Sementara untuk KKPR saat ini masih ada kendala di OSS (One-Stop Service), terkait ini ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah secara online atau manual. Terlebih lagi, masterplan yang disusun masih belum sempurna, sehingga saat ini PT WPR sedang melakukan beberapa penyesuaian.

Beberapa isu strategis terkait pengembangan KI Jorong diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelola baru telah ditunjuk, yaitu PT Wahyu Putera Ramadhan
2. Telah memiliki infrastruktur dalam dan luar kawasan
3. PT Wahyu Putera Ramadhan akan merevisi masterplan
4. Memiliki kendala masalah perizinan OSS

Beberapa rekomendasi kebijakan terkait pengembangan KI Jorong adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan masterplan
2. Pembuatan Feasibility Studies (FS)

3. Menyelesaikan masalah tata ruang dan tata guna lahan yang ada untuk menjamin kepastian hukum/legalitas penggunaan lahan sesuai peruntukannya
4. Memilih investor yang berkomitmen
5. Memperbaiki dan memperlancar akses jalan ke pelabuhan
6. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dikeluhkan calon investor, buat kajian ulang jika KI Jorong memang layak dan menjadi KI yang atraktif bagi investor

\*\*\*



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan Daerah**

**Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi,  
dan Pengendalian Pembangunan**

Gedung Bappenas Lantai 9  
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan  
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



**Phone**

Cell: (021) 31936207



**Email & Online**

Email: [dit.peppd@bappenas.go.id](mailto:dit.peppd@bappenas.go.id)